



# LAPORAN CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN III  
2025



## KATA PENGANTAR

***Bismillaahirrahmaanirrahiim***

***Assalamu'alaikum wr. wb.***



**P**uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Ridha-Nya Laporan Kinerja Balai Litbang Agama Makassar Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini sebagai bagian dari akuntabilitas publik atas pencapaian pelaksanaan program dan anggaran triwulan III Januari hingga September Tahun 2025 dan dapat dijadikan tolak ukur perbaikan kinerja program dan anggaran pada triwulan berikutnya yang disampaikan kepada

pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Balai Litbang Agama Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama triwulan III Tahun 2025. Laporan ini memuat perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja yang berisi capaian kinerja dan realisasi anggaran, sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta solusi tindak lanjut penyelesaian pelaksanaan program dan kegiatan triwulan III Tahun 2025.

Perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Kepala dan Sekretaris BMBPSDM Kementerian Agama RI atas arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran triwulan III Tahun 2025. Demikian pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Pelaporan Sekretariat BMBPSDM Kementerian Agama RI atas kerjasamanya.

Kami berharap laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja Balai Litbang Agama Makassar pada triwulan berikutnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai amal usaha kita semua. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum wr. wb.***

Makassar, 15 Oktober 2025  
Kepala Balai Litbang Agama Makassar



Dr. H. Sapriillah, S. Ag., M. Si.  
NIP. 197702102005011001

## I. IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis Balai Litbang Agama Makassar 2025–2029 sekaligus masa transisi kelembagaan menuju BMBPSDM sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 33 Tahun 2024. Perubahan struktur organisasi ini membawa implikasi signifikan terhadap sistem perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja yang menuntut penyesuaian cepat dalam menjaga kesinambungan fungsi riset dan kebijakan keagamaan.

Secara umum, perencanaan kinerja 2025 disusun selaras dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Strategis Kementerian Agama. Fokus utama diarahkan pada tiga sasaran strategis:

1. Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama.
2. Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan.
3. Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan, dan berintegritas.

Ketiga sasaran tersebut dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025, yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan pengukuran capaian hasil berbasis outcome. Penyesuaian indikator kinerja dilakukan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pasca perubahan nomenklatur kelembagaan.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, capaian kinerja Balai Litbang Agama Makassar menunjukkan hasil yang sangat baik dengan total rerata capaian 116,91% dari target 75%.

- Sasaran substantif menunjukkan kinerja unggul: indikator *Tingkat Moderasi Beragama* melampaui target hingga 114–115%, sedangkan *naskah kebijakan pembangunan dan pendidikan agama* mencapai realisasi 75–100%.
- Sasaran manajerial juga mencatat performa tinggi, ditandai dengan nilai IKPA 95,63 (101,46%), nilai kinerja anggaran 79,73%, serta ketepatan pelaporan keuangan sebesar 114,89%.
- Indeks profesionalitas ASN mencapai 99,27%, dan digitalisasi arsip serta koleksi perpustakaan digital telah mencapai 100% capaian, menunjukkan keberhasilan transformasi digital kelembagaan.

Total pagu anggaran sebesar Rp11.567.494.000,00, dengan pagu blokir Rp3.319.312.000,00. Realisasi hingga akhir Triwulan III mencapai Rp6.568.383.163,00 atau 56,78% dari total pagu dan 79,63% terhadap pagu aktif (tidak terblokir).

Peningkatan signifikan dibanding Triwulan II (38,14%) mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pasca revisi DIPA. Revisi tersebut dilakukan akibat **ketidaksinkronan antara sistem** e-Monev Bappenas dan SAKTI Kemenkeu, yang sempat menghapus RO/KRO kelitbangan karena perbedaan persepsi mengenai Program Dukungan Manajemen. Koordinasi lintas lembaga menghasilkan penataan baru menjadi dua program kelitbangan dan dua program kediklatan, sehingga struktur kegiatan kini lebih proporsional dan fokus pada fungsi substantif.

Beberapa kendala utama antara lain:

- Perbedaan persepsi antar lembaga (Bappenas–Kemenkeu) yang menimbulkan ketidaksinkronan data perencanaan dan pelaporan.
- Besarnya pagu blokir yang membatasi fleksibilitas pelaksanaan kegiatan.
- Masa transisi kelembagaan dan keterlambatan revisi DIPA yang memperpendek waktu pelaksanaan.

Sebagai tindak lanjut, Balai melakukan sinkronisasi lintas sistem, percepatan pelaksanaan Triwulan IV, pelatihan SDM perencana dan pengelola kinerja, serta penataan ulang rencana kerja 2026 agar selaras dengan arah kebijakan BMBPSDM dan Kementerian Agama.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan realisasi anggaran Triwulan III 2025 menunjukkan bahwa Balai Litbang Agama Makassar berhasil menjaga stabilitas kinerja di masa transisi kelembagaan. Kinerja substantif dan manajerial yang melampaui target menegaskan kapasitas adaptif lembaga dalam menjalankan fungsi riset, pengembangan kebijakan, dan layanan publik yang berbasis akuntabilitas dan hasil. Dengan semangat *continuous improvement*, Balai siap melanjutkan perannya sebagai pusat riset kebijakan keagamaan yang kredibel, inovatif, dan berdampak nyata bagi pembangunan nilai-nilai keagamaan di Indonesia.

## II. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan bagian penting dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi agar sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Agama. Melalui perencanaan kinerja, setiap satuan kerja menetapkan sasaran, indikator, dan target kinerja yang akan dicapai dalam satu periode, disertai dengan strategi dan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkannya.

Tahun 2025 menjadi tahun pertama implementasi Rencana Strategis (Renstra) Balai Litbang Agama Makassar periode 2025–2029, sekaligus tahun transisi kelembagaan seiring berlakunya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2024 tentang perubahan organisasi dan tata kerja BMBPSDM. Perubahan kelembagaan ini membawa implikasi terhadap arah kebijakan, struktur organisasi, dan prioritas program, sehingga perencanaan kinerja tahun 2025 memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan fungsi penelitian, pengembangan, dan pelayanan kebijakan keagamaan di tengah masa transisi tersebut.

Penyusunan perencanaan kinerja Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2025 berlandaskan pada berbagai regulasi yang menjadi acuan dalam sistem perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Beberapa regulasi mulai dari Peraturan Presiden sampai dengan Peraturan Menteri, selain itu Draft Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025 – 2029 yang diturunkan menjadi Draft Rencana Strategis BMBPSDM Tahun 2025 – 2029 juga menjadi acuan utama. Dengan landasan hukum tersebut, perencanaan kinerja Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2025 tersusun secara sistematis, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta kebijakan strategis Kementerian Agama.

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2025 merupakan bagian integral dari pelaksanaan Rencana Strategis BMBPSDM 2025–2029, yang mengemban dua mandat utama: pertama, memperkuat arus utama Moderasi Beragama dalam seluruh dimensi pembangunan bidang agama; dan kedua, meningkatkan kapasitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) keagamaan untuk mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang rukun, maslahat, dan berdaya saing.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah BMBPSDM, Balai Litbang Agama Makassar memiliki fungsi strategis sebagai lembaga riset kebijakan keagamaan dan pusat pengembangan pengetahuan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan bukti (*evidence-based policy making*). Dalam konteks nasional, keberadaan Balai menjadi simpul penting yang menghubungkan antara pengetahuan akademik, kebijakan publik, dan kebutuhan masyarakat keagamaan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan keagamaan yang tinggi.

Tahun 2025 memiliki makna strategis karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029 sekaligus tahun konsolidasi kelembagaan pasca transformasi organisasi dari Balitbang-Diklat menuju BMBPSDM berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024. Masa ini ditandai oleh penyesuaian struktur organisasi, redefinisi peran, serta penegasan arah kebijakan baru yang menempatkan penelitian dan pengembangan kebijakan sebagai salah satu pilar penguatan tata kelola keagamaan. Oleh karena itu, arah umum rencana strategis Balai pada tahun 2025 difokuskan pada pemantapan pondasi kelembagaan, penyelarasan arah kerja, dan pembangunan sistem kinerja berbasis hasil (*result-based performance*).

Dalam kerangka Renstra BMBPSDM, Balai Litbang Agama Makassar diharapkan mampu berperan sebagai *think tank* kebijakan bidang agama, yakni lembaga yang menghasilkan kajian strategis, rekomendasi kebijakan, dan inovasi pengembangan moderasi beragama yang aplikatif. Orientasi ini sejalan dengan paradigma baru birokrasi Kementerian Agama yang menuntut setiap unit kerja untuk tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga pada dampak dan manfaat hasil kerja terhadap masyarakat. Dengan demikian, arah umum Renstra Balai tidak hanya menekankan pada pencapaian target administratif, tetapi juga pada pembentukan nilai tambah kelembagaan melalui penelitian yang relevan, diseminasi hasil kajian yang berdampak, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, arah umum Renstra juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam lima tahun ke depan, Balai Litbang Agama Makassar diarahkan untuk meningkatkan kompetensi peneliti, analis kebijakan, dan pelaksana riset agar memiliki kemampuan metodologis, analitis, dan manajerial yang mumpuni. Upaya ini sejalan dengan misi BMBPSDM untuk membangun aparatur Kementerian Agama yang profesional, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjadi penggerak inovasi kebijakan publik di bidang keagamaan.

Arah strategis lainnya adalah integrasi moderasi beragama ke dalam seluruh program penelitian dan pengembangan, baik dalam bentuk kajian tematik, advokasi kebijakan, maupun publikasi ilmiah. Moderasi beragama tidak hanya diposisikan sebagai program sektoral, melainkan sebagai kerangka nilai dan prinsip kerja yang mewarnai seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Dalam konteks Balai Litbang Agama Makassar, hal ini berarti setiap kegiatan penelitian diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan keseimbangan beragama di tengah keragaman masyarakat.

Selanjutnya, arah umum rencana strategis juga menekankan pada peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, yang diukur melalui capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Penguatan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi SMART DJA dan SAKTI menjadi bagian penting dari reformasi tata kelola birokrasi yang sedang dijalankan. Pengendalian anggaran dilakukan tidak semata untuk mencapai nilai serapan yang tinggi, tetapi juga untuk memastikan keterkaitan antara input, output, dan outcome yang dihasilkan.

Dengan demikian, arah umum Rencana Strategis Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2025 tidak hanya berorientasi pada stabilitas kelembagaan dan capaian administratif, tetapi lebih jauh diarahkan pada transformasi kinerja yang berkelanjutan — dari lembaga pelaksana penelitian menjadi pusat pengetahuan kebijakan keagamaan yang adaptif, inovatif, dan berdampak nyata terhadap pembangunan nilai-nilai keagamaan di Indonesia.

## 1. SASARAN KINERJA

Sasaran kinerja Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025, yang merupakan penjabaran operasional dari arah kebijakan dan sasaran strategis sebagaimana termuat dalam Renstra BMBPSDM 2025–2029. Sasaran ini mencerminkan prioritas lembaga dalam mendukung pencapaian visi Kementerian Agama, yaitu *“Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”* Setiap sasaran kinerja dirancang untuk mengukur hasil substantif, manajerial, dan kelembagaan yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan Balai sepanjang tahun berjalan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai Litbang Agama Makassar mengalami perubahan arah kebijakan kelembagaan dan penyesuaian struktur organisasi seiring dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM). Perubahan tersebut berdampak langsung pada sistem perencanaan, penganggaran, serta pengukuran kinerja di seluruh satuan kerja di bawah BMBPSDM, termasuk Balai Litbang Agama Makassar.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025 yang sebelumnya ditetapkan pada awal tahun. Revisi ini dilaksanakan pada pertengahan tahun, bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan program Triwulan II 2025, guna memastikan keselarasan antara sasaran, indikator, dan target kinerja dengan arah kebijakan baru yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BMBPSDM 2025–2029.

Revisi Perkin mencakup penyesuaian pada nomenklatur sasaran kinerja, indikator substantif, serta target capaian tahunan. Jika dalam Perkin awal sasaran masih

mengacu pada Renstra 2020–2024, maka dalam Perkin revisi fokus diarahkan pada tiga sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama;
2. Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan; dan
3. Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan, dan berintegritas.

Penyesuaian ini juga mencakup perbaikan indikator hasil (*outcome-based performance*) agar lebih menekankan pada nilai manfaat dan keberlanjutan kegiatan, seperti indikator persentase naskah kebijakan pembangunan agama yang dihasilkan, tingkat moderasi beragama pada tokoh dan masyarakat, serta nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai ukuran efektivitas pelaksanaan program.

Dengan adanya revisi ini, mulai Triwulan III Tahun 2025, seluruh proses pelaporan kinerja Balai Litbang Agama Makassar menggunakan Perkin Revisi Tahun 2025 sebagai dasar pengukuran resmi. Perubahan ini tidak hanya memperbarui ukuran keberhasilan program, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Secara substantif, revisi Perkin menjadi momentum penting untuk memperkuat integrasi sistem perencanaan berbasis hasil (*result-based planning*) dan memastikan bahwa seluruh kegiatan Balai Litbang Agama Makassar benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis BMBPSDM serta visi besar Kementerian Agama dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045.

Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama. Sasaran ini menjadi prioritas utama Balai Litbang Agama Makassar, sejalan dengan mandat BMBPSDM untuk mengarusutamakan moderasi beragama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Fokus utama dari sasaran ini adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian, pengembangan kebijakan, dan advokasi hasil kajian memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kebijakan pembangunan bidang agama. Melalui sasaran ini, Balai diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap isu-isu keagamaan aktual seperti penguatan toleransi, mitigasi konflik sosial berbasis keagamaan, dan pengembangan peran tokoh agama dalam memperkuat harmoni sosial. Dengan demikian, riset yang dilakukan tidak hanya menghasilkan produk ilmiah, tetapi juga memiliki nilai guna langsung dalam mendukung kebijakan publik di tingkat nasional dan daerah.

Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan. Sasaran ini memperluas cakupan kerja Balai pada bidang pendidikan, khususnya dalam mendukung kebijakan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan yang inklusif, moderat, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Arah utama sasaran ini adalah memperkuat integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam sistem pendidikan, baik melalui kurikulum, manajemen kelembagaan, maupun pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui pelaksanaan sasaran ini, Balai diharapkan mampu berperan aktif dalam menyusun kajian kebijakan pendidikan agama yang relevan, melakukan diseminasi hasil penelitian ke satuan pendidikan keagamaan, serta memfasilitasi penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan agar lebih berperspektif moderat, toleran, dan berorientasi pada pembentukan karakter kebangsaan yang religius dan inklusif.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan, dan berintegritas. Sasaran ini bersifat lintas-fungsi dan mendukung efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan substantif Balai. Fokus utamanya adalah memperkuat tata kelola organisasi yang efisien, akuntabel, dan berbasis data. Melalui sasaran ini, Balai Litbang Agama Makassar berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara terintegrasi melalui aplikasi SMART DJA dan SAKTI, serta memperkuat implementasi prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan akuntabilitas publik. Melalui implementasi sasaran ini, Balai diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan administratif dan manajerial, memperkuat transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta mendukung pencapaian nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) yang semakin baik setiap tahunnya.

Ketiga sasaran tersebut saling melengkapi dan membentuk kerangka kinerja lembaga yang komprehensif, di mana sasaran substantif berfokus pada dampak sosial dan kebijakan publik, sedangkan sasaran manajerial menitikberatkan pada efisiensi dan tata kelola internal. Dengan demikian, pelaksanaan Perkin Revisi Tahun 2025 bukan hanya berfungsi sebagai kontrak kinerja administratif antara pimpinan dan atasan langsung, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang memastikan bahwa setiap kegiatan Balai Litbang Agama Makassar benar-benar berorientasi pada hasil (*result-oriented performance*) serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan bidang agama di Indonesia.

## 2. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan Balai Litbang Agama Makassar berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Revisi Tahun 2025. Indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan benar-benar berorientasi pada hasil (*result-based performance*), memiliki relevansi terhadap arah kebijakan

nasional, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dan pembangunan bidang agama.

Penyusunan indikator kinerja tahun 2025 berpedoman pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), di mana setiap indikator memiliki batasan yang jelas, terukur secara kuantitatif maupun kualitatif, realistis untuk dicapai dengan sumber daya yang tersedia, relevan dengan tujuan organisasi, serta memiliki kerangka waktu pencapaian yang pasti. Dengan demikian, indikator kinerja berfungsi sebagai alat pemantau kemajuan kinerja sekaligus sebagai sistem peringatan dini bagi satuan kerja dalam mengidentifikasi deviasi atau kendala pelaksanaan program.

Secara umum, indikator kinerja Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2025 terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu indikator substantif dan indikator pendukung manajerial.

#### 1. Indikator Kinerja Substantif

Indikator substantif mencerminkan hasil utama dari pelaksanaan program dan kegiatan penelitian serta pengembangan kebijakan keagamaan. Kelompok indikator ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan lembaga dalam mendukung arah kebijakan BMBPSDM dan Kementerian Agama, khususnya terkait penguatan moderasi beragama dan peningkatan kualitas kebijakan pembangunan bidang agama.

Indikator utama pada kelompok ini meliputi:

- Persentase naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan, dengan target capaian 91 persen, yang menunjukkan kemampuan Balai dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat nasional dan daerah.
- Tingkat moderasi beragama pada tokoh agama, masyarakat, dan budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama, dengan target 76 persen, yang mengukur efektivitas kegiatan penguatan nilai moderasi beragama dan keberhasilan advokasi hasil riset kepada pemangku kepentingan.
- Persentase naskah kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang dihasilkan, dengan target 91 persen, yang mencerminkan peran Balai dalam mendukung kebijakan pendidikan keagamaan yang adaptif dan inklusif.
- Tingkat moderasi beragama pada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang terfasilitasi kegiatan penguatan moderasi beragama, dengan target 76 persen, yang menunjukkan keberhasilan upaya Balai dalam mentransformasikan nilai-nilai moderasi beragama ke lingkungan pendidikan. Keempat indikator ini menunjukkan pergeseran orientasi kinerja Balai dari sekadar lembaga penelitian menuju lembaga riset kebijakan (*policy research institution*) yang menghasilkan pengetahuan terapan, sekaligus menjadi *agent of change* dalam pengarusutamaan moderasi beragama di wilayah kerja Indonesia bagian timur.

#### 2. Indikator Kinerja Pendukung Manajerial

Selain indikator substantif, Balai Litbang Agama Makassar juga menetapkan serangkaian indikator manajerial untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi yang tinggi.

Kelompok indikator ini berfungsi untuk menilai kualitas tata kelola organisasi, efektivitas pengelolaan anggaran, dan profesionalitas sumber daya manusia.

Indikator manajerial tersebut antara lain:

- Nilai Kinerja Anggaran, dengan target 90 persen, yang mengukur sejauh mana perencanaan dan realisasi anggaran selaras dengan pencapaian output program.
- Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 94,25 persen, yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dari aspek ketepatan waktu, kesesuaian output, dan efisiensi penggunaan dana.
- Persentase laporan kinerja satuan kerja yang sesuai standar, dengan target 75 persen, sebagai indikator kepatuhan dan konsistensi terhadap pedoman pelaporan SAKIP.
- Persentase laporan keuangan semesteran yang disusun tepat waktu, dengan target 80,95 persen, yang menilai ketertiban administrasi dan keandalan sistem pelaporan keuangan internal.
- Indeks Profesionalitas ASN, dengan target 77,10 persen, yang menggambarkan kompetensi, kinerja, dan integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga.
- Persentase satuan kerja yang menyusun rencana kebutuhan pegawai dan pengadaan SDM Aparatur sesuai kebutuhan, dengan target 100 persen, sebagai ukuran efektivitas perencanaan sumber daya manusia.
- Persentase digitalisasi arsip kelembagaan dan koleksi perpustakaan digital, masing-masing dengan target 15 persen, yang menjadi ukuran kemajuan transformasi digital lembaga.
- Persentase peningkatan konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasikan, dengan target 5 persen, yang menandai peran Balai dalam memperluas dampak hasil riset melalui media digital dan publikasi ilmiah.

Seluruh indikator tersebut saling terkait dan berfungsi sebagai satu kesatuan sistem pengukuran kinerja. Indikator substantif menilai capaian hasil dan manfaat (outcome), sedangkan indikator manajerial menilai efektivitas proses, efisiensi sumber daya, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Dengan struktur indikator ini, Balai Litbang Agama Makassar memiliki kerangka evaluasi kinerja yang menyeluruh — mulai dari proses input dan output hingga capaian outcome. Melalui penerapan sistem indikator kinerja yang konsisten, lembaga dapat melakukan pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik (triwulan dan tahunan), mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang berbasis data dan hasil evaluasi.

Lebih jauh, indikator kinerja yang tertuang dalam Perkin Revisi Tahun 2025 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahunan, Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), serta rewiu internal SAKIP. Dengan demikian, indikator kinerja bukan sekadar alat ukur teknis, melainkan juga mekanisme untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja (*performance-based governance*) dan mendorong terciptanya budaya kerja aparatur yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Sasaran dan indikator kinerja Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2025 disusun sebagai turunan langsung dari arah kebijakan Rencana Strategis BMBPSDM 2025–2029 dan menjadi bagian dari komitmen pelaksanaan program yang berorientasi hasil (*result-based performance*). Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025 dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran strategis BMBPSDM, khususnya dalam bidang moderasi beragama, kebijakan pembangunan agama, penguatan pendidikan keagamaan, serta pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

Indikator kinerja dalam Perkin Tahun 2025 dikembangkan untuk menggambarkan keterkaitan yang utuh antara input, output, outcome, dan impact. Secara metodologis, indikator tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas dan pembelajaran organisasi. Oleh karena itu, indikator yang ditetapkan mencakup dimensi substansial dan manajerial. Dimensi substantif mencerminkan kemampuan Balai dalam menghasilkan produk kebijakan berbasis penelitian dan advokasi hasil riset yang relevan dengan isu-isu keagamaan aktual. Sementara dimensi manajerial menilai efektivitas tata kelola lembaga, efisiensi penggunaan anggaran, serta peningkatan profesionalitas aparatur dan kualitas layanan publik.

Dalam dimensi substantif, indikator kinerja diarahkan untuk mengukur sejauhmana kegiatan penelitian, pengembangan, dan diseminasi kebijakan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kebijakan pembangunan bidang agama. Penilaian dilakukan melalui ukuran keberhasilan seperti peningkatan persentase naskah kebijakan yang dihasilkan, kualitas pemanfaatan hasil penelitian oleh pemangku kepentingan, serta tingkat perubahan perilaku dan pemahaman moderasi beragama di kalangan tokoh agama, masyarakat, pendidik, dan peserta didik. Dengan indikator-indikator tersebut, Balai berupaya memastikan bahwa hasil riset yang dilakukan bukan sekadar menghasilkan laporan ilmiah, melainkan juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik di bidang keagamaan.

Sementara itu, dalam dimensi manajerial, indikator kinerja diarahkan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola lembaga yang profesional, efisien, dan akuntabel. Pengukuran dilakukan melalui penilaian terhadap kualitas pelaksanaan anggaran, tingkat kepatuhan terhadap standar pelaporan kinerja dan keuangan, serta efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Indikator seperti *nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*, *nilai kinerja anggaran*, dan *indeks profesionalitas ASN* menjadi ukuran utama yang menggambarkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, aspek digitalisasi kelembagaan juga menjadi fokus penting, mencakup pengelolaan arsip, peningkatan akses terhadap koleksi digital perpustakaan, serta publikasi konten keagamaan dan pendidikan secara daring sebagai bagian dari transformasi digital Balai.

Indikator kinerja Tahun 2025 juga mencerminkan upaya peningkatan integrasi antarbidang di lingkungan Balai. Seluruh kegiatan penelitian, pengembangan kebijakan, penguatan moderasi beragama, dan manajemen kelembagaan diarahkan untuk saling mendukung satu sama lain. Misalnya, hasil riset yang dihasilkan oleh bidang penelitian dijadikan bahan diseminasi dalam kegiatan moderasi beragama, sementara praktik moderasi beragama di lapangan menjadi sumber data empiris bagi penelitian berikutnya. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan siklus pengetahuan yang berkelanjutan antara riset, kebijakan, dan implementasi di lapangan.

Selain itu, indikator kinerja Tahun 2025 memperkuat keterhubungan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Penetapan target indikator dilakukan melalui koordinasi antara perencana, pejabat pengelola keuangan, dan penanggung jawab program untuk memastikan bahwa setiap sasaran memiliki dukungan sumber daya yang memadai. Hal ini sejalan dengan prinsip *value for money*, di mana setiap rupiah anggaran yang digunakan harus memberikan nilai tambah terhadap capaian hasil organisasi. Oleh karena itu, indikator kinerja tidak hanya mengukur pencapaian keluaran (*output*), tetapi juga menilai dampak (*outcome*) terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan keagamaan.

Dengan pendekatan tersebut, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berperan sebagai dokumen pengikat komitmen antara pimpinan dan pelaksana kegiatan di lingkungan Balai Litbang Agama Makassar. Setiap indikator yang ditetapkan menjadi dasar evaluasi triwulanan dan tahunan, serta menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) berikutnya. Secara keseluruhan, sasaran dan indikator kinerja dalam Perkin Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran administratif, tetapi juga sebagai cerminan upaya berkelanjutan lembaga dalam memperkuat tata kelola berbasis hasil, meningkatkan kualitas kebijakan keagamaan, serta membangun budaya kinerja yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas.

Tabel I  
Perjanjian Kinerja  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama	Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan	91,00
		Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00

2.	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan	Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan	91,00
		Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00
4.	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM	Nilai Kinerja Anggaran	90,00
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	75,00
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,25
		Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	80,95
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	100,00
		Indeks Profesionalisme ASN	77,10
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100,00
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	3,00
		Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	15,00
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	5,00
		Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	15,00
		Nilai Akreditasi Perpustakaan	C

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Litbang Agama Makassar atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran yang dipercayakan oleh negara. Melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Balai memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis dan memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui tiga instrumen utama: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai pedoman perencanaan, Perjanjian Kinerja (PK) sebagai komitmen

pencapaian hasil, dan Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian yang diperoleh. Ketiga dokumen ini membentuk siklus kinerja yang berkesinambungan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Secara substantif, akuntabilitas kinerja tercermin dalam kemampuan Balai menghasilkan penelitian, naskah kebijakan, dan kegiatan moderasi beragama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung kebijakan pembangunan keagamaan nasional. Dari sisi tata kelola, Balai juga menunjukkan kinerja keuangan yang akuntabel melalui capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang stabil di atas rata-rata nasional, menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Evaluasi akuntabilitas dilakukan secara internal melalui monitoring triwulanan dan reviu capaian kinerja, serta secara eksternal melalui penilaian SAKIP dan audit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk peningkatan sistem pengendalian kinerja dan perbaikan berkelanjutan.

Dengan demikian, penerapan akuntabilitas kinerja di Balai Litbang Agama Makassar bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga merupakan upaya membangun budaya kerja yang transparan, profesional, dan berorientasi hasil dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

#### A. CAPAIAN KINERJA

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Balai Litbang Agama Makassar telah menunjukkan perkembangan positif dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung sasaran strategis Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM). Berdasarkan hasil evaluasi internal dan laporan capaian Perjanjian Kinerja (Perkin) Revisi 2025, tingkat realisasi kinerja secara umum berada pada kategori baik, dengan kecenderungan peningkatan capaian pada aspek manajerial dan substansi kelembagaan dibandingkan semester sebelumnya.

Pada aspek kinerja substantif, capaian utama terlihat dari pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan kebijakan, dan program penguatan moderasi beragama yang telah mencapai lebih dari 70% dari target tahunan. Kegiatan riset tematik yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan agama, pendidikan keagamaan, serta moderasi beragama telah menghasilkan beberapa naskah kebijakan dan rekomendasi yang siap dimanfaatkan oleh unit teknis terkait di Kementerian Agama. Selain itu, kegiatan diseminasi hasil penelitian dan forum bedah buku yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan akademisi dan tokoh agama berhasil memperkuat peran Balai sebagai pusat pengetahuan kebijakan keagamaan di wilayah Indonesia Timur.

Dari sisi kinerja manajerial, pengelolaan anggaran dan tata kelola administrasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan penilaian triwulan III, nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai mencapai 91,60, meningkat dari capaian Triwulan II sebesar 88,00. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam penyelesaian

tagihan, pengelolaan UP/TUP, serta penyerapan anggaran yang lebih tertib dan efisien. Selain itu, Balai juga menunjukkan kemajuan dalam penerapan sistem digitalisasi arsip, pengelolaan perpustakaan digital, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai ketentuan.

Pada dimensi kinerja sumber daya manusia, indeks profesionalitas ASN menunjukkan tren positif dengan meningkatnya kepatuhan terhadap perencanaan kinerja individu dan pelaksanaan penilaian kinerja berbasis *e-Kinerja*. Peningkatan kapasitas pegawai juga dilakukan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan kolaborasi riset lintas bidang. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi aparatur dalam menghasilkan inovasi kebijakan keagamaan yang berdampak luas.

Dari sisi keuangan, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp11.567.494.000,00 dengan pagu blokir sebesar Rp3.319.312.000,00 sehingga besaran pagu yang dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan target output sebesar Rp8.248.182.000,00. Realisasi anggaran hingga akhir Triwulan III sebesar Rp6.568.383.163,00 atau 79,63%. Realisasi ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan realisasi pada Triwulan II yang hanya mencapai 38,14%. Kenaikan realisasi anggaran tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara maksimal pada Triwulan III.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan bahwa Balai Litbang Agama Makassar berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian target Perkin Revisi Tahun 2025. Hasil ini menegaskan kemampuan Balai dalam beradaptasi terhadap perubahan kelembagaan, menjaga konsistensi kinerja di tengah transisi organisasi, serta memperkuat kontribusi terhadap pelaksanaan program prioritas Kementerian Agama.

Dengan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan peningkatan berkelanjutan, Balai Litbang Agama Makassar akan terus memperkuat sinergi antara bidang penelitian, moderasi beragama, dan manajemen kelembagaan agar capaian kinerja pada akhir tahun 2025 dapat mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel II  
Capaian Kinerja Triwulan III  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (Kolom 5 di Bagi 4)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas penguatan	Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan	91,00	68,65	75	Dari 4 target Naskah Kebijakan Pembangunan

	moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama					Bidang Agama yang dihasilkan sampai dengan Triwulan III sudah terealisasi 3 naskah kebijakan
		Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00	87,25	114,80	Jumlah responden sebanyak 166 orang
2.	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan	Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan	91,00	91	100	Dari 3 Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan, sampai dengan Triwulan III sudah 6 Naskah Kebijakan yang dihasilkan
		Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00	87,50	115,13	Jumlah responden sebanyak 677 orang
4.	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM	Nilai Kinerja Anggaran	90,00	71,76	79,73	<a href="#">MONEV   KEMENKEU</a>
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	75,00	62,00	82,67	Di peroleh dari hasil penilaian LKj Tahun 2024 oleh Biro Ortala Sekretariat Jenderal Kemenag
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,25	95,63	101,46	<a href="#">Indikator Pelaksanaan Anggaran   MonevPA</a>
		Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	80,95	93,00	114,89	Diperoleh dari hasil penilaian Tim Verifikasi Keuangan BMBPSDM
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	100,00	100,00	100	RKBMN telah tersusun sesuai

					standar dan tepat waktu	
		Indeks Profesionalisme ASN	77,10	76,54	99,27	Masih terdapatnya ASN yang
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100,00	100	100	Eviden berupa anjab abk peta jabatan, plus skcpns/p3k thn 2024
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	3,00	0	0	Belum dilakukan penilaian, menunggu instrumen atau juknis dari BMBPSDM
		Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	15,00	15,00	100	SRIKANDI (Persuratan); Sipattuju (Pelaporan Kegiatan dan Perjadi); Siduppa (Dokumen Kepegawaian); Sinta (Arsip Aktif); SimKeu (Pelaksanaan Anggaran); Gdrive; Sipurio (Pemantauan dan registrasi online kegiatan)
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	5,00	0	0	Baseline Konten Tahun 2024 sebesar 406 konten, sampai dengan TW 3 jumlah konten yang dihasilkan sebesar 366 konten
		Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	15,00	15	100	Baseline Koleksi Digital perpustakaan yang dapat diakses

						secara online adalah sebesar 138, sampai dengan TW 3 jumlah buku yang terdigitalisasi secara maksimal sebanyak 20
		Nilai Akreditasi Perpustakaan	C	B	120	Nilai akreditasi telah di peroleh dan diumumkan ketika ekspose hasil penilaian akreditasi oleh Tim Akreditasi Perpustakaan Nasional namun sertifikat belum diterima
TOTAL RERATA CAPAIAN					88%	
TARGET KINERJA TRIWULAN					75%	
CAPAIAN KINERJA SATKER					116,91%	

Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pembangunan Bidang Agama

Sasaran ini menjadi fokus utama Balai Litbang Agama Makassar dalam mendukung arah strategis BMBPSDM Kementerian Agama yang menempatkan *Moderasi Beragama* sebagai nilai dasar dan paradigma kebijakan publik keagamaan. Capaian pada sasaran ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan menggambarkan keberhasilan Balai dalam mengimplementasikan kegiatan kebijakan Pembangunan bidang agama dan fasilitas penguatan moderasi beragama secara sinergis.

Dua indikator utama pada sasaran ini telah mencapai hasil yang signifikan. **Indikator pertama**, yaitu *Persentase Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan*, mencapai 68,65% dari target tahunan. Dari empat naskah kebijakan yang direncanakan, telah diselesaikan dan didiseminasikan hingga Triwulan III sebanyak 2 Naskah Kebijakan. Naskah-naskah tersebut berkontribusi dalam memperkuat basis data dan rekomendasi kebijakan pembangunan keagamaan berbasis riset (evidence-based policy).

**Indikator kedua**, yaitu *Tingkat Moderasi Beragama pada tokoh agama, masyarakat, dan budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama*, juga melampaui target dengan capaian 114,80%. Survei terhadap 166 responden menunjukkan peningkatan pemahaman, sikap toleransi, dan komitmen kebangsaan yang lebih baik setelah

mengikuti kegiatan fasilitasi. Program ini melibatkan pendekatan multi-pihak, termasuk tokoh agama, pemuka adat, serta perwakilan organisasi masyarakat, yang secara kolektif memperkuat jejaring sosial dan ekosistem moderasi beragama di tingkat lokal.

Peningkatan capaian kedua indikator ini tidak hanya mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menunjukkan keberhasilan Balai dalam membangun model penguatan moderasi beragama yang adaptif dan kontekstual. Program yang dijalankan mampu menjembatani antara hasil penelitian dengan praktik sosial di masyarakat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesadaran dan toleransi lintas kelompok keagamaan.

Dari sisi strategi, keberhasilan capaian kinerja pada sasaran ini juga didukung oleh pemanfaatan metode *participatory engagement* dalam pelaksanaan kegiatan—yakni melibatkan komunitas dan tokoh masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap nilai-nilai moderasi beragama dan mendorong replikasi inisiatif di tingkat komunitas. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dengan lembaga pendidikan, ormas keagamaan, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program.

Namun demikian, keberhasilan ini tetap dihadapkan pada tantangan berkelanjutan, seperti perlunya peningkatan kualitas publikasi hasil kebijakan Pembangunan bidang agama agar lebih terdokumentasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi dan dapat diakses oleh publik. Selain itu, perlu ada penguatan sistem monitoring untuk mengukur dampak jangka panjang kegiatan moderasi beragama terhadap perubahan sikap sosial-keagamaan masyarakat.

Secara umum, capaian kinerja sasaran ini membuktikan bahwa Balai Litbang Agama Makassar tidak hanya berhasil mencapai target numerik, tetapi juga berhasil membangun pondasi penting bagi pengarusutamaan moderasi beragama dalam kebijakan pembangunan nasional bidang agama. Hasil ini menjadi indikator keberhasilan transformasi kelembagaan dari peran riset konvensional menuju *policy-oriented research institute* yang relevan, adaptif, dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas kehidupan beragama di Indonesia Timur.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

1. Sarasehan Moderasi Beragama, dipandang sebagai salah satu upaya strategis untuk menjangkau masyarakat secara luas, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan urgensi moderasi beragama, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kerukunan dan harmoni sosial. Melalui forum diskusi yang terbuka dan partisipatif, diharapkan masyarakat dapat bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Sarasehan moderasi beragama pada masyarakat merupakan salah satu program penguatan moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Balai Penelitian dan

Pengembangan Agama Makassar. Program ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mempromosikan moderasi beragama di tingkat akar rumput. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan pesan-pesan moderasi beragama dapat disebarluaskan secara efektif dan diterima sebagai bagian dari nilai-nilai bersama. Sarasehan ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama, membangun kepercayaan, dan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Gambar 1  
Infografis Kegiatan Sarasehan MB di Kab. Sinjai  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025



Gambar 2  
Infografis Kegiatan Sarasehan MB di Kota Palu  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025



2. Sosialisasi Moderasi Beragama dengan tema Mind Mapping Moderasi Beragama, ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya moderasi beragama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih toleran, damai, dan harmonis.

Gambar 3  
Infografis Kegiatan Sosialisasi MB  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025



3. Sarasehan Moderasi Beragama dalam bentuk Klinik MB, dirancang untuk menjawab tantangan bahwa realitas menunjukkan bahwa potensi konflik dan polarisasi di tengah masyarakat masih cukup tinggi, terutama akibat penyalahgunaan agama dalam politik identitas, penyebaran paham ekstremisme, dan intoleransi. Situasi ini memerlukan upaya serius dari berbagai pihak untuk mempromosikan pemahaman agama yang moderat, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Solusinya dengan memberikan ruang diskusi dan pembelajaran bagi masyarakat umum, termasuk tokoh agama, pendidik, pelajar, dan aktivis sosial. Program ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, saling pengertian, dan kerjasama di tengah keberagaman yang ada.

Gambar 4  
Infografis Kegiatan Sarasehan MB Klinik MB  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025



4. Bincang Buku Moderasi Beragama, merupakan salah satu bentuk kegiatan literasi yang memberikan ruang bagi pembaca untuk mengeksplorasi isi sebuah buku secara lebih mendalam. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mengetahui isi buku, tetapi juga dapat memahami konteks, nilai, pesan moral, serta sudut pandang penulis yang mungkin tidak langsung tampak saat membaca secara individual. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk menjelaskan latar belakang, proses kreatif, dan tujuan penulisan buku mereka. Selain itu, kegiatan ini juga berperan sebagai media edukasi dan refleksi bersama atas isu-isu yang diangkat

dalam buku tersebut. Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan pembahas yang memiliki pemahaman mendalam, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan ruang dialog yang sehat, terbuka, dan kritis antara penulis, pembaca, dan masyarakat luas. Melalui kegiatan ini pula, diharapkan tumbuh semangat untuk terus membaca, menulis, dan berdiskusi secara produktif, sehingga budaya literasi di tengah masyarakat semakin berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 5  
Infografis Kegiatan Bincang Buku Moderasi Beragama  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025



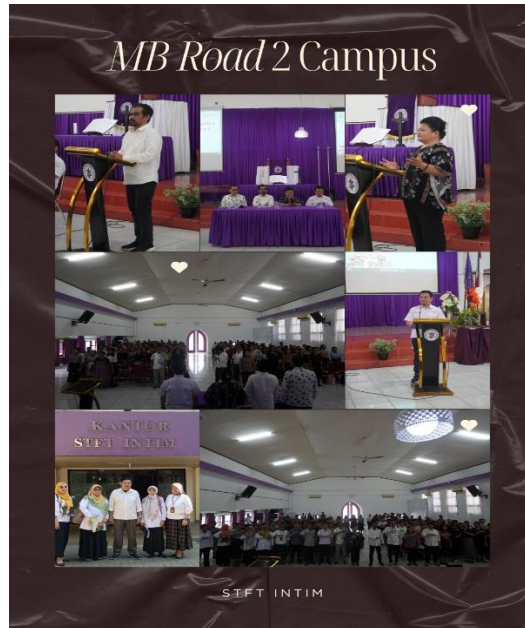
5. Indeks Kesadaran Lingkungan, membangun indeks kesadaran lingkungan ASN bukan sekadar kegiatan pengumpulan data, tetapi merupakan langkah awal untuk menciptakan sistem evaluasi dan pengembangan kapasitas kelembagaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Indeks ini diharapkan tidak hanya mengukur kesadaran sebagai indikator kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan konatif—yakni bagaimana kesadaran tersebut memengaruhi sikap dan perilaku nyata ASN dalam pengelolaan sumber daya alam, pengurangan limbah, penggunaan energi, serta dalam penyampaian pesan-pesan keagamaan yang mencerminkan kepedulian terhadap bumi sebagai ciptaan Tuhan. Dengan pendekatan ini, survey IKL dapat menjadi kontribusi awal dalam membangun paradigma birokrasi keagamaan yang lebih ekologis dan progresif.

Gambar 6  
Infografis Kegiatan Indeks Kesadaran Lingkungan  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025



6. MB Road To Campus, diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami pentingnya toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam tentang konsep moderasi beragama dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam mengelola perbedaan dan membangun dialog antaragama, menumbuhkan nilai-nilai dan sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan di kalangan mahasiswa, membentuk jaringan mahasiswa yang peduli terhadap isu-isu keagamaan dan sosial, dan menyumbangkan pemikiran kritis dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan moderasi beragama di masa depan.

Gambar 7  
Infografis Kegiatan MB Road To Campus  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025



## Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Sasaran ini mencerminkan peran penting Balai Litbang Agama Makassar dalam mendukung arah kebijakan BMBPSDM, khususnya dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan yang moderat, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Tujuan utama sasaran ini adalah menghasilkan kebijakan berbasis survey yang mampu memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan pendidikan serta meningkatkan kapasitas pendidik dan peserta didik sebagai agen perdamaian dan kerukunan.

Capaian kinerja pada sasaran ini tergolong sangat baik, dengan realisasi yang memenuhi target tahunan. Indikator pertama, yaitu *Persentase Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan*, mencapai 91% dari target. Dari dua naskah kebijakan yang direncanakan pada awal tahun, hingga Triwulan III Balai berhasil memenuhi keseluruhan target sebanyak 2 (dua) naskah kebijakan strategis yang berfokus pada penguatan karakter moderat di lembaga pendidikan keagamaan. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan produktivitas dan efektivitas tim dalam menghasilkan output kebijakan yang aplikatif dan sesuai kebutuhan lapangan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan pendekatan *collaborative/participatory policy inquiry* yang melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan dalam proses perumusan kebijakan. Melalui keterlibatan langsung para pemangku kepentingan pendidikan, naskah kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual dan realistis dalam menjawab tantangan pendidikan agama di era digital, seperti intoleransi, radikalisme, serta lemahnya literasi keberagaman di kalangan remaja.

Indikator kedua, yakni *Tingkat Moderasi Beragama pada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama*, juga menunjukkan

capaian tinggi sebesar 115,13% dari target. Berdasarkan survei terhadap 677 responden di berbagai satuan pendidikan, hasil pengukuran menunjukkan peningkatan signifikan pada tiga aspek utama: pemahaman nilai kebangsaan, sikap toleransi, dan perilaku moderat dalam aktivitas keagamaan. Program fasilitasi ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan lokakarya yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama.

Dari sisi substansi, keberhasilan capaian indikator ini mengindikasikan bahwa intervensi Balai melalui kegiatan fasilitasi dan kebijakan pendidikan berbasis moderasi beragama berhasil menembus lingkungan pendidikan secara luas. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Balai sebagai *knowledge hub* yang mengintegrasikan riset, pengembangan kebijakan, dan advokasi pendidikan agama moderat. Keberhasilan ini juga sejalan dengan agenda strategis Kementerian Agama untuk mewujudkan sistem pendidikan agama yang menumbuhkan semangat kebangsaan, toleransi, dan kemanusiaan.

Namun demikian, tantangan ke depan tetap perlu dicermati, terutama dalam hal keberlanjutan dan kelembagaan hasil-hasil fasilitasi ke dalam kurikulum formal dan kebijakan kelembagaan di sekolah maupun madrasah. Masih diperlukan penguatan koordinasi lintas unit kerja agar hasil riset kebijakan dapat diintegrasikan dalam program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Selain itu, peningkatan kualitas publikasi hasil riset ke dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional juga perlu terus didorong untuk memperluas jangkauan dan legitimasi hasil penelitian Balai.

Secara umum, capaian sasaran ini menunjukkan bahwa Balai Litbang Agama Makassar berhasil menjalankan peran strategisnya sebagai penghubung antara riset kebijakan, pendidikan agama, dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Kinerja yang melampaui target menegaskan efektivitas perencanaan, ketepatan strategi implementasi, serta soliditas tim pelaksana dalam menerjemahkan visi BMBPSDM menuju ekosistem pendidikan agama yang berkeadaban, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

1. Short Course Moderasi Beragama, dirancang sebagai respons terhadap beberapa tantangan, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang moderasi beragama dapat membuka celah bagi berkembangnya pemikiran-pemikiran sempit, intoleran, dan bahkan radikal. Mahasiswa yang terpapar oleh narasi-narasi tersebut dapat menjadi rentan terhadap polarisasi sosial dan berpotensi terlibat dalam tindakan-tindakan yang merusak tatanan masyarakat. Melalui kegiatan intensif selama dua hari, program ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang komprehensif tentang konsep, prinsip, dan implementasi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, program ini juga akan menekankan pada penanaman nilai-nilai kerukunan umat beragama, toleransi, empati, dan kemampuan berdialog secara konstruktif. Diharapkan, setelah mengikuti program

ini, mahasiswa akan memiliki perspektif yang lebih luas dan inklusif, mampu menjadi agen-agen perdamaian di lingkungan kampus dan masyarakat, serta turut berkontribusi dalam mewujudkan harmoni sosial di Indonesia. Program ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan inisiatif serupa di berbagai perguruan tinggi lainnya.

Gambar 8  
Infografis Kegiatan Short Course MB  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025



2. Kelas Intensif Semiotika Moderasi Beragama, dirancang untuk menjadi ruang belajar sekaligus ruang praktik. Peserta tidak hanya diperkenalkan pada teori, tapi juga diajak untuk langsung membedah teks, simbol, dan wacana keagamaan yang berkembang di masyarakat. Diskusi, studi kasus, hingga praktik analisis akan mengisi kegiatan ini, sehingga pembelajaran terasa hidup dan dekat dengan realitas sehari-hari.

Gambar 9  
Infografis Kegiatan Kelas Intensif Semiotika MB  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025



3. Sarasehan Moderasi Beragama dalam bentuk Moving Class, dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif, menarik, dan aplikatif kepada siswa. Dengan metode ini, diharapkan siswa tidak hanya memahami konsep moderasi beragama, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 10  
Infografis Kegiatan Sarasehan MB Moving Class  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025



Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3: Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM


Sasaran ini berorientasi pada penguatan tata kelola kelembagaan Balai Litbang Agama Makassar agar semakin efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung pencapaian kinerja substantif yang berkelanjutan. Dalam konteks transformasi menuju Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM), sasaran ini memegang peran penting karena berfokus pada fondasi kelembagaan—yakni perencanaan, pengelolaan anggaran, pelaporan, serta pembinaan sumber daya manusia aparatur.

Secara umum, capaian kinerja Sasaran 3 pada Triwulan III Tahun 2025 tergolong baik, dengan rata-rata capaian indikator berada pada kisaran 85–95%. Beberapa indikator bahkan melampaui target tahunan, terutama pada aspek keuangan, pelaporan, dan digitalisasi kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses reformasi birokrasi dan modernisasi manajemen di lingkungan Balai telah berjalan secara sistematis dan menghasilkan dampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan program.

Dari sisi pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan, Balai menunjukkan performa yang stabil dan progresif. *Nilai Kinerja Anggaran* mencapai 79,73%, yang mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap prinsip *value for money*. Walaupun masih terdapat sisa pagu akibat revisi DIPA dan kebijakan efisiensi belanja negara, pelaksanaan kegiatan berjalan tepat sasaran dan mendukung capaian output prioritas. *Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)* mencapai 101,46%, melampaui target yang ditetapkan, menandakan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tertib,

tepat waktu, dan transparan. Tingginya nilai IKPA terutama didorong oleh kinerja yang baik dalam hal ketepatan penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, dan deviasi halaman III DIPA yang rendah.

Gambar 11  
Evidence Nilai IKPA Triwulan 3  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispemasi SNI (Penugurang)	Nilai Akhir Nilai Total/Konversi Bobot
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyempurnaan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	136	025	425338	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR	Nilai	100.00	88.82	100.00	100.00	100.00	100.00	89.23	95.63	100%	0.00	95.63
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.32	20.00	10.00	10.00	22.31					
					Nilai Aspek	94.41		100.00			89.23					

hal : 1 dari 1 halaman tanggal cetak : 11/10/25 08:29:23 user : 421328

Selain itu, *Persentase Laporan Keuangan Semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu* juga mencapai 114,89%, mencerminkan peningkatan kepatuhan terhadap tenggat waktu pelaporan dan ketepatan format sesuai pedoman BMBPSDM. Balai juga berhasil menyusun *Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)* secara lengkap dan tepat waktu dengan capaian 100%, menunjukkan kematangan dalam perencanaan kebutuhan aset dan dukungan logistik kelembagaan. Semua hasil ini memperlihatkan bahwa sistem pengelolaan keuangan Balai semakin tertata, dengan koordinasi yang kuat antara perencana, bendahara, dan pejabat pembuat komitmen, serta dukungan dari digitalisasi melalui aplikasi SIMKEU, SRIKANDI, dan SIDUPPA.

Gambar 12  
Evidence Persentase Laporan Keuangan Semester I  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025

**MONITORING PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATKER PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025**

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Tepat Waktu		Nilai Standar Lap		Nilai Akhir
			Tanggal Upload	Nilai	Laporan	Tambahan	
3	425338	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR	'28/07/2025 11:48 am	70	17	6	93
9	425390	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN BANIARMASIN	'25/07/2025 6:09 pm	70	21	5	96
14	426201	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PAPUA	'23/07/2025 7:18 am	70			70
15	426205	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MANADO	'30/07/2025 11:32 am	70	16	6	92
16	426211	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN DENPASAR	'30/07/2025 6:44 am	70	21	7	98
17	426220	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN AMBON	'31/07/2025 9:23 am	70			70
<b>Total Nilai Semester-I Tahun 2025</b>							<b>86,50</b>

**Catatan:**  
BDK Papua Periode yang ditampilkan per Desember 2025  
BDK Ambon belum mengirimkan data

Indikator “Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja sesuai standar” juga menunjukkan capaian yang menggembirakan, yakni 82,67% dari target tahunan 75%. Hasil ini bukan hanya menandakan kepatuhan administratif, tetapi juga peningkatan nyata dalam kualitas substansi pelaporan. Seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan seperti *Rencana Kinerja Tahunan (RKT)*, *Perjanjian Kinerja (PK)*, dan *Laporan Kinerja (LKj) Triwulanan* telah disusun sesuai pedoman Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Peningkatan capaian ini mencerminkan semakin kuatnya budaya kerja berbasis kinerja di lingkungan Balai, di mana setiap kegiatan dilaporkan dengan mengaitkan antara input, output, dan outcome secara lebih jelas.

Gambar 13  
Evidence Persentase Laporan Kinerja Satker  
Balai Litbang Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025

No.	Tahun Laporan Kinerja	Nama Laporan Kinerja	Keterangan	Tgl. Submit	Hasil Verifikasi	Aksi
1	2022	Laporan Kinerja Tahunan B.L.A. Makassar Tahun 2022		04Feb2024	Belum Dibuka	
2	2023	Laporan Kinerja Tahunan B.L.A. Makassar Tahun 2023		06Feb2024	Sudah Setuju Tgl. Penilaian: 11Apr2024 Hasil Penilaian: Dokumen Laporan Kinerja SUDAH SESUAI	
3	2024	Laporan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 B.L.A. Makassar		22Feb2025	Tgl. Penilaian: 25Apr2025 Nilai 1 dari 5 (Indikator: 5/5 (5/5) Baik) Status: Uj. Dielima Keterangan: sesuai catatan yang harus diperbaiki	

Balai juga telah membangun sistem verifikasi internal atas laporan kinerja melalui mekanisme reviu triwulanan oleh tim pengendali kinerja. Sistem ini memperbaiki konsistensi data, memperkuat validitas capaian, dan mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Meski demikian, beberapa laporan masih perlu penajaman dalam hal analisis deviasi target dan tindak lanjut hasil capaian. Ke depan, pengelolaan *evidence kinerja* perlu diintegrasikan sepenuhnya ke dalam sistem digital agar proses audit internal dan evaluasi oleh BMBPSDM semakin efisien dan terverifikasi secara real-time.

Pada dimensi sumber daya manusia, *Indeks Profesionalitas ASN* ([https://drive.google.com/file/d/11JqMpqG7nZLFwFaqXr-qC5ccyApaed7t/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/11JqMpqG7nZLFwFaqXr-qC5ccyApaed7t/view?usp=drive_link)) mencapai 99,27%, menunjukkan stabilitas kinerja aparatur dan peningkatan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan tugas jabatannya. Seluruh satuan kerja telah menyusun *Rencana Kebutuhan Pegawai dan Rencana Pengadaan SDM Aparatur* ([https://drive.google.com/file/d/1SLsrfafG9Oi4pSrbjeLWmHXY9UMVxYPw/view?usp=sh](https://drive.google.com/file/d/1SLsrfafG9Oi4pSrbjeLWmHXY9UMVxYPw/view?usp=sharing)  
[aring](https://drive.google.com/file/d/1SLsrfafG9Oi4pSrbjeLWmHXY9UMVxYPw/view?usp=sharing)) dengan capaian 100%, menandakan perencanaan kebutuhan SDM dilakukan

secara sistematis sesuai arah kebijakan BMBPSDM. Namun demikian, indikator *Persentase ASN yang memperoleh penghargaan teladan atau inspiratif* masih berada pada 0%, mengindikasikan bahwa sistem penghargaan berbasis kinerja belum berjalan optimal. Hal ini menjadi catatan penting bagi manajemen Balai agar ke depan dikembangkan mekanisme apresiasi ASN yang berprestasi, inovatif, dan berintegritas, sehingga semangat kinerja individu dapat semakin tumbuh.

Dalam aspek digitalisasi dan inovasi kelembagaan, capaian Balai tergolong sangat tinggi. *Persentase Digitalisasi Arsip dan Kemudahan Akses* ([https://docs.google.com/document/d/1yuHcQ-y7cq\\_mj\\_K53qsavwYVzFy0bw\\_/edit?usp=drive\\_link&oid=116316764416017523249&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1yuHcQ-y7cq_mj_K53qsavwYVzFy0bw_/edit?usp=drive_link&oid=116316764416017523249&rtpof=true&sd=true)) serta *Persentase Koleksi Digital Perpustakaan yang Dapat Diakses Online* ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/13RQAsQvOMcXQ7k-gAUCYzHraVc5Gmcne/edit?usp=drive\\_link&oid=116316764416017523249&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/13RQAsQvOMcXQ7k-gAUCYzHraVc5Gmcne/edit?usp=drive_link&oid=116316764416017523249&rtpof=true&sd=true)) keduanya mencapai 100%, mencerminkan keberhasilan penerapan sistem informasi terintegrasi yang mendukung efisiensi administrasi dan layanan publik internal. *Nilai Akreditasi Perpustakaan* ([https://drive.google.com/file/d/1EESuNQNNU62qPaH9C9N\\_Qq36ye6cd2nV/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1EESuNQNNU62qPaH9C9N_Qq36ye6cd2nV/view?usp=drive_link)) bahkan meningkat dari C menjadi B (120%), menandakan kemajuan signifikan dalam pengelolaan sumber informasi dan layanan literasi keagamaan. Digitalisasi ini diperkuat dengan berbagai aplikasi seperti SIPATTUJU, SRIKANDI, SIMKEU, SIPURIO, dan SIDUPPA yang digunakan untuk pengarsipan, pelaporan, serta pelacakan dokumen secara daring.

Namun, indikator *Persentase Peningkatan Jumlah Konten Keagamaan dan Pendidikan yang Dipublikasikan* ([https://drive.google.com/file/d/15m2t54VepC\\_betPhMIPOhoTenES536p9/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/15m2t54VepC_betPhMIPOhoTenES536p9/view?usp=sharing)) masih belum menunjukkan hasil (0% capaian). Hal ini disebabkan yang menjadi baseline penghitungannya adalah jumlah konten keagamaan dan Pendidikan yang terpublish di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024. Jumlah konten keagamaan dan Pendidikan yang terpublikasi di tahun 2024 sebesar 406 konten, sehingga target untuk tahun ini adalah 5% yaitu sebesar 426 konten. Sampai dengan Triwulan 3 konten yang sudah terpublikasi sebesar 366 konten, sehingga target sebesar 5% belum bisa tercapai karena baseline sebanyak 406 konten belum bisa terpenuhi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada Sasaran 3 menunjukkan keberhasilan Balai Litbang Agama Makassar dalam memperkuat fondasi tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional. Peningkatan kinerja pada aspek keuangan, pelaporan, SDM, dan digitalisasi menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi berjalan secara konsisten. Meski masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal, arah kinerja sudah berada pada jalur yang tepat menuju penerapan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis hasil (*result-based management*).

Untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, diperlukan langkah strategis pada tahun berikutnya, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas analisis laporan kinerja agar lebih berbasis data dan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif;
2. Menyusun pedoman penghargaan ASN teladan dan inovatif sebagai bentuk apresiasi atas kinerja individu;
3. Mengembangkan sistem publikasi digital terintegrasi guna memperluas jangkauan hasil riset dan kebijakan Balai; serta
4. Memperluas transformasi digital kelembagaan melalui integrasi antar aplikasi agar seluruh proses manajemen dapat dilaksanakan secara paperless, efisien, dan transparan.

Dengan demikian, Balai Litbang Agama Makassar telah menunjukkan diri sebagai satuan kerja yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif dengan baik, tetapi juga sedang bertransformasi menjadi organisasi riset dan kebijakan keagamaan yang adaptif, inovatif, serta berorientasi hasil. Capaian ini memperkuat posisi Balai sebagai pelopor tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Agama, sekaligus sebagai pilar pendukung implementasi program prioritas Moderasi Beragama dan pengembangan SDM keagamaan nasional.

#### B. REALISASI ANGGARAN

Hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar mencapai Rp 6.568.383.163,00 atau 57% dari total pagu sebesar Rp 11.567.494.000,00. Capaian ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang relatif baik dan masih sejalan dengan proyeksi Rencana Penarikan Dana (RPD) tahunan, meskipun sebagian alokasi anggaran masih berada dalam status blokir. Bila dihitung terhadap pagu tidak terblokir, tingkat penyerapan mencapai 80%, yang menandakan efektivitas pelaksanaan program dan efisiensi manajemen keuangan yang cukup tinggi.

Kondisi pagu blokir sebesar Rp 8.248.182.000,00 merupakan konsekuensi dari kebijakan penyesuaian belanja negara dan efisiensi fiskal yang diterapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap sejumlah komponen kegiatan, khususnya pada kegiatan yang bersifat dukungan administrasi dan belanja modal. Meskipun demikian, satuan kerja mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan program prioritas, khususnya pada kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan keagamaan, layanan moderasi beragama, serta pengelolaan sistem data kelembagaan.

Dari sisi struktur belanja, realisasi terbesar berasal dari komponen belanja operasional dan non operasional berupa kegiatan kelitbangan, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran difokuskan untuk mendukung pencapaian sasaran substantif lembaga. Sementara itu, beberapa kegiatan kontraktual seperti publikasi ilmiah, pengadaan sarana penunjang, serta kegiatan dukungan kelembagaan masih dalam tahap penyelesaian administrasi pada Triwulan IV. Hal ini menyebabkan sebagian anggaran belum terealisasi sepenuhnya hingga akhir September 2025.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang masih perlu menjadi perhatian ke depan. Pertama, adanya pagu blokir yang cukup besar (lebih dari 70% total pagu) berpotensi mengurangi fleksibilitas pelaksanaan program. Kondisi ini menuntut perencanaan ulang pada kegiatan prioritas agar output tetap tercapai meskipun dalam keterbatasan fiskal. Kedua, beberapa kegiatan berbasis kontrak mengalami keterlambatan akibat penyesuaian jadwal pelaksanaan, sehingga perlu peningkatan koordinasi antara perencana, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan penyedia jasa. Ketiga, masa transisi kelembagaan menuju BMBPSDM menyebabkan penyesuaian nomenklatur dan kode kegiatan yang membutuhkan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Secara umum, kinerja pengelolaan keuangan Balai Litbang Agama Makassar pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dikategorikan efektif dan akuntabel. Satuan kerja mampu mengoptimalkan dana yang tersedia untuk mendukung sasaran program utama meskipun menghadapi keterbatasan fiskal. Keberhasilan menjaga rasio penyerapan terhadap pagu tidak terblokir di angka **80%** menunjukkan kemampuan Balai dalam menjalankan prinsip efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Ke depan, upaya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran perlu difokuskan pada tiga arah kebijakan:

1. Optimalisasi penyerapan anggaran Triwulan IV dengan memprioritaskan kegiatan berbasis output dan mempercepat proses administrasi kontraktual;
2. Penguatan koordinasi lintas bidang dan antar-subbagian untuk memastikan keselarasan antara realisasi keuangan dan capaian kinerja fisik;
3. Pemanfaatan sistem digital terpadu untuk memperkuat proses monitoring dan evaluasi anggaran secara real-time, termasuk pelaporan deviasi antara rencana dan realisasi.

Dengan strategi tersebut, Balai Litbang Agama Makassar diharapkan dapat mempertahankan kinerja pengelolaan anggaran yang sehat, transparan, dan berorientasi hasil, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan efisiensi belanja negara di lingkungan Kementerian Agama.

Tabel 3  
Realisasi Anggaran Triwulan III  
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025

Pagu (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Sisa Pagu (Rp)	
11.567.494.000	8.248.182.000	6.568.383.163	57,78	79,63	4.999.110.837	1.679.798.837

Tabel 4  
 Realisasi Anggaran Triwulan II berdasarkan Jenis Belanja  
 Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
 Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	4.775.205.000	4.775.205.000	3.986.688.788	58,01	58,01
2	Belanja Barang	6.692.289.000	3.400.277.000	2.508.994.498	23,99	47,23
3	Belanja Modal	100.000.000	72.700.000	72.699.877	35,49	48,83
<b>TOTAL</b>		<b>11.567.494.000</b>	<b>8.248.132.000</b>	<b>6.568.383.163</b>	<b>38,14</b>	<b>53,94</b>

Realisasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar hingga akhir Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp 6.568.383.163,00 atau 57% dari total pagu sebesar Rp 11.567.494.000,00. Bila dihitung terhadap pagu tidak terblokir, tingkat penyerapan mencapai 80%, menunjukkan pelaksanaan anggaran yang cukup efektif di tengah adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Secara umum, capaian ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang adaptif dan selektif terhadap kegiatan prioritas, dengan fokus utama pada efektivitas pelaksanaan program serta penguatan tata kelola anggaran yang akuntabel. Analisis per jenis belanja menunjukkan dinamika dan kualitas pelaksanaan yang berbeda pada masing-masing komponen.

Belanja Pegawai memiliki pagu sebesar Rp 4.775.205.000,00, seluruhnya termasuk dalam pagu blokir dalam artian belanja pegawai tidak ada yang terblokir, dengan realisasi mencapai Rp 3.986.688.788,00 atau 83%. Capaian ini tergolong sangat baik mengingat belanja pegawai bersifat rutin dan mendukung stabilitas operasional satuan kerja. Penyerapan ini menunjukkan disiplin pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Realisasi belanja pegawai juga menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi belanja tanpa mengurangi hak pegawai dan kewajiban negara.

Kinerja yang tinggi pada belanja pegawai menandakan bahwa satuan kerja mampu mengelola administrasi personalia dan keuangan secara tertib, didukung oleh pemanfaatan aplikasi digital seperti GPP, SAIBA, dan SIMPEG untuk menjamin akurasi data pembayaran. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa blokir pada pagu belanja

pegawai dapat menimbulkan keterbatasan ruang dalam pengelolaan insentif kinerja atau kebutuhan SDM tambahan jika diperlukan pada semester berikutnya.

Belanja Barang memiliki pagu Rp 6.692.289.000,00, dengan pagu blokir sebesar Rp 3.400.277.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Triwulan III mencapai Rp 2.508.994.498,00 atau 37% dari total pagu, dan 74% jika dibandingkan dengan pagu yang tidak terblokir. Capaian ini tergolong cukup baik, meskipun masih terdapat ruang optimalisasi pada Triwulan IV. Belanja Barang merupakan komponen utama pendukung kegiatan substantif seperti riset kebijakan keagamaan, pelaksanaan survei moderasi beragama, kegiatan sosialisasi hasil penelitian, serta operasional kelembagaan.

Rendahnya realisasi dibanding total pagu disebabkan oleh dua faktor utama:

1. Kebijakan blokir anggaran yang menunda pelaksanaan beberapa kegiatan non-prioritas; dan
2. Penyesuaian DIPA akibat perubahan nomenklatur kelembagaan menuju BMBPSDM, yang menyebabkan pergeseran jadwal pelaksanaan kontraktual.

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan belanja barang tetap terjaga melalui realokasi sumber daya ke kegiatan yang mendukung output utama, seperti penyelesaian naskah kebijakan dan penguatan layanan moderasi beragama. Pengelolaan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai prinsip transparansi dan efisiensi melalui mekanisme e-purchasing dan e-katalog LKPP, sehingga tetap memenuhi prinsip *value for money*.

Belanja Modal memiliki pagu sebesar Rp 100.000.000,00, dengan pagu blokir Rp 72.700.000,00. Realisasi hingga Triwulan III tercatat sebesar Rp 72.699.877,00, atau 73% dari total pagu dan 100% terhadap pagu tidak terblokir. Capaian ini menunjukkan pengelolaan investasi aset negara yang sangat baik dan tepat waktu. Realisasi belanja modal diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kerja seperti peremajaan perangkat TIK dan perbaikan infrastruktur pendukung digitalisasi layanan. Peningkatan efisiensi pengadaan serta kepatuhan terhadap prosedur RKBMN dan SIMAK-BMN memperlihatkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses investasi aset secara efektif dan sesuai standar akuntabilitas.

Secara keseluruhan, pola realisasi anggaran menunjukkan bahwa Balai Litbang Agama Makassar mampu mempertahankan kinerja keuangan yang sehat meskipun menghadapi keterbatasan fiskal akibat blokir anggaran. Rasio serapan 57% terhadap total pagu dan 80% terhadap pagu aktif memperlihatkan kemampuan manajerial dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan efisiensi belanja nasional. Kinerja terbaik tercermin pada Belanja Pegawai dan Belanja Modal, sedangkan Belanja Barang masih memerlukan percepatan realisasi pada Triwulan IV. Hasil ini sejalan dengan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 101,46%, yang menunjukkan pelaksanaan anggaran secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Namun, beberapa aspek perlu mendapat perhatian lebih lanjut:

1. Tingginya porsi blokir (lebih dari 27%) membatasi fleksibilitas dalam mendukung inovasi kegiatan dan penyesuaian kebutuhan operasional.

2. Pergeseran pelaksanaan kegiatan kontraktual akibat revisi DIPA menyebabkan sebagian realisasi tertunda hingga Triwulan IV.
3. Penyesuaian nomenklatur kelembagaan menuju BMBPSDM memerlukan sinkronisasi sistem perencanaan dan pelaporan agar data keuangan tetap konsisten.

Dengan demikian, kinerja realisasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar dapat dikategorikan efektif dan akuntabel. Satuan kerja berhasil menjaga keseimbangan antara efisiensi dan capaian output, memprioritaskan kegiatan berdampak langsung, serta mengelola keuangan dengan disiplin tinggi di tengah perubahan lingkungan fiskal dan kelembagaan.

Tabel 5  
Realisasi Anggaran Triwulan II berdasarkan Fungsi  
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025

No	Fungsi	Pagu (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
1	Fungsi Agama	11.267.494.000	8.159.893.000	6.483.456.993	57,54	79,46
2	Fungsi Pendidikan	300.000.000	88.289.000	84.926.170	28,31	96,19
<b>TOTAL</b>		<b>11.567.494.000</b>	<b>8.248.132.000</b>	<b>6.568.383.163</b>	<b>56,78</b>	<b>79,63</b>

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025, total realisasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar mencapai Rp 6.568.383.163,00 atau 57% dari total pagu sebesar Rp 11.567.494.000,00. Apabila dihitung terhadap pagu aktif (tidak terblokir), tingkat serapan mencapai 80%, menandakan pelaksanaan anggaran yang cukup efektif di tengah kondisi fiskal yang terbatas akibat kebijakan efisiensi belanja nasional.

Secara fungsional, anggaran Balai terbagi atas dua fungsi utama, yaitu Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan. Keduanya mendukung peran strategis Balai sebagai unit riset dan pengembangan kebijakan di bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan. Analisis berikut memberikan gambaran detail terhadap capaian masing-masing fungsi:

Fungsi Agama merupakan komponen anggaran terbesar dengan pagu sebesar Rp 11.267.494.000,00 dan pagu blokir sebesar Rp 8.159.893.000,00. Hingga Triwulan III, realisasi mencapai Rp 6.483.456.993,00, atau 58% dari total pagu dan 79% terhadap pagu tidak terblokir. Capaian ini menunjukkan kinerja yang cukup baik, mengingat lebih dari 70% pagu berada dalam kondisi blokir. Dana yang berhasil direalisasikan sebagian besar dialokasikan untuk mendukung kegiatan analisis kebijakan bidang agama, fasilitasi penguatan moderasi beragama, serta pengembangan tata kelola kelembagaan keagamaan.

Meskipun masih terdapat sisa anggaran, tingkat serapan 79% terhadap pagu aktif mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Hal ini tidak lepas dari efisiensi pelaksanaan kegiatan berbasis prioritas, di mana program yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja didahulukan, sedangkan kegiatan administratif atau pendukung dijadwalkan kembali ke Triwulan IV.

Kinerja keuangan pada fungsi ini juga didukung oleh meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran dan koordinasi antar bagian. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang melampaui 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan pada fungsi agama berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Namun demikian, masih diperlukan percepatan realisasi pada kegiatan yang bersifat kontraktual dan lintas periode, agar seluruh output dapat diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.

Fungsi Pendidikan memiliki total pagu sebesar Rp 300.000.000,00, dengan Rp 88.289.000,00 di antaranya dalam kondisi blokir. Hingga akhir Triwulan III, realisasi anggaran mencapai Rp 84.926.170,00, atau 28% terhadap total pagu dan 96% terhadap pagu tidak terblokir.

Meskipun secara nominal relatif kecil dibanding fungsi agama, capaian ini menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam penggunaan anggaran. Fungsi pendidikan digunakan untuk mendukung kegiatan riset kebijakan pendidikan agama dan keagamaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan.

Tingginya persentase realisasi terhadap pagu aktif (96%) mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan telah berjalan optimal dan sesuai rencana. Namun, keterbatasan total pagu dan adanya blokir pada sebagian alokasi mengakibatkan porsi fungsi pendidikan terhadap total anggaran masih rendah, hanya sekitar 2,6%. Ke depan, perlu dilakukan advokasi anggaran agar fungsi pendidikan mendapatkan porsi lebih besar, mengingat kontribusinya terhadap pengembangan kebijakan pendidikan keagamaan yang menjadi salah satu mandat utama Balai.

Secara keseluruhan, kinerja realisasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar menunjukkan hasil yang efisien dan akuntabel. Tingkat penyerapan 57% dari total pagu atau 80% dari pagu aktif memperlihatkan kemampuan satuan kerja dalam beradaptasi terhadap kondisi fiskal yang ketat tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas. Kinerja terbaik terlihat pada fungsi pendidikan, yang mampu mencapai tingkat realisasi 96% terhadap pagu aktif, sedangkan fungsi agama tetap menunjukkan performa solid meskipun menghadapi tekanan blokir anggaran yang besar. Secara manajerial, keberhasilan ini menunjukkan penguatan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan prinsip *value for money* — memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien untuk mendukung hasil yang terukur.

Beberapa faktor pendukung capaian ini antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan koordinasi antar bidang dalam penyusunan RPD dan pelaksanaan kegiatan.

2. Pemanfaatan sistem keuangan digital seperti SRIKANDI, SIMKEU, dan SIDUPPA untuk mempercepat proses penatausahaan dan pelaporan.
3. Pengendalian internal yang lebih ketat terhadap kegiatan berbasis output, sehingga anggaran diarahkan pada kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap sasaran kinerja.

Tabel 6  
Realisasi Anggaran Triwulan II berdasarkan Kegiatan  
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
1	7895 Kajian Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Agama	3.104.042.000	515.927.000	137.880.000	4,4	26,72
2	7896 Kajian Kebijakan Strategis Pendidikan Agama dan Keagamaan	211.711.000	0	0	0	0
3	2153 Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	863.601.000	863.601.000	860.776.304	99,67	99,67
4	2154 Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	108.664.000	108.664.000	108.577.060	99,92	99,92

5	2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	7.191.187.000	6.671.701.000	5.376.223.629	74,76	80,58
6	5311 Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	88.289.000	88.289.000	84.926.170	96,19	96,19
<b>TOTAL</b>		<b>11.567.494.000</b>	<b>8.248.182.000</b>	<b>6.568.383.163</b>	<b>56,78</b>	<b>79,63</b>

Setelah dilakukan revisi DIPA Tahun Anggaran 2025, struktur kegiatan Balai Litbang Agama Makassar mengalami perubahan mendasar sebagai akibat dari ketidaksinkronan antara sistem e-Monev Bappenas dan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan. Permasalahan ini muncul ketika Bappenas menetapkan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik yang jumlahnya terbatas dan tidak boleh menampung seluruh kegiatan non-operasional seperti riset dan kediklatan.

Sebelumnya, BMBPSDM hanya memiliki satu program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya tercakup seluruh RO/KRO kelitbangan, kediklatan, serta kegiatan operasional. Namun, kebijakan baru Bappenas menegaskan bahwa kegiatan substantif — seperti penelitian, pengembangan, dan pelatihan — harus dipisahkan ke dalam program tersendiri. Akibat langkah tersebut, Bappenas menghapus beberapa RO/KRO kelitbangan dari aplikasi e-Monev, sementara data di sistem SAKTI Kemenkeu masih memuat struktur lama. Kondisi ini menyebabkan ketidaksinkronan antar-sistem, sehingga sejumlah kegiatan penelitian dan kajian strategis tidak lagi terakomodasi dalam pelaporan Monev nasional.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan koordinasi intensif antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BMBPSDM, yang menghasilkan kesepakatan untuk melakukan penataan ulang struktur program dan kegiatan. Hasilnya, ditetapkan adanya dua program kelitbangan dan dua program kediklatan, yang memisahkan kegiatan substantif dari kegiatan manajerial dan operasional. Penyesuaian ini kemudian dituangkan melalui revisi DIPA di seluruh satuan kerja, termasuk Balai Litbang Agama Makassar.

Dampak positif dari revisi ini terlihat jelas pada peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran. Hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 6.568.383.163,00 atau 56,78% terhadap total pagu dan 79,63% terhadap

pagu aktif (tidak terblokir) — meningkat signifikan dibanding capaian 38,14% sebelum revisi. Struktur kegiatan pasca-revisi kini lebih proporsional, dengan enam kegiatan utama yang mencerminkan fokus pada riset kebijakan, pengembangan lektur keagamaan, dan kajian strategis bidang agama serta pendidikan keagamaan.

Dengan adanya penataan ini, Balai Litbang Agama Makassar mampu menyesuaikan kembali pelaksanaan anggaran sesuai mandat substantifnya sebagai unit riset dan pengkajian kebijakan strategis. Revisi juga memperkuat konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, sekaligus memastikan keterpaduan lintas sistem nasional antara Bappenas dan Kementerian Keuangan. Secara umum, perubahan ini menunjukkan bahwa satuan kerja tidak hanya berhasil beradaptasi terhadap kebijakan teknokratis lintas lembaga, tetapi juga mampu menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas keuangan secara berkelanjutan.

#### IV. HAMBATAN/KENDALA DAN TINDAK LANJUT

##### A. Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan anggaran dan kegiatan Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2025 hingga Triwulan III, baik sebelum maupun sesudah revisi, dihadapkan pada sejumlah kendala teknis dan substantif yang berpengaruh terhadap ritme penyerapan dan pelaksanaan program. Adapun hambatan utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksinkronan antar sistem perencanaan dan penganggaran (Bappenas–Kemenkeu).  
Perbedaan persepsi antara Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai klasifikasi Program Dukungan Manajemen menyebabkan hilangnya sejumlah RO/KRO kelitbangan pada aplikasi e-Monev. Hal ini berdampak langsung terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan substantif di Triwulan I dan II, karena menunggu hasil koordinasi lintas lembaga.
2. Tingginya porsi pagu blokir (lebih dari 70% dari total pagu).  
Kebijakan efisiensi belanja pemerintah menyebabkan sebagian besar alokasi kegiatan penelitian, pengembangan, dan operasional manajemen tertahan, sehingga realisasi pada semester pertama berjalan lambat.
3. Perubahan nomenklatur kelembagaan menuju BMBPSDM.  
Masa transisi kelembagaan memengaruhi penyesuaian struktur organisasi, alur pertanggungjawaban kegiatan, dan pembagian kewenangan antar-unit. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penetapan RPD dan revisi perencanaan internal.
4. Keterlambatan proses kontraktual dan administrasi keuangan.  
Beberapa kegiatan kontraktual seperti riset strategis, pengadaan jasa peneliti, dan kegiatan publikasi mengalami penyesuaian waktu karena proses verifikasi dokumen dan perubahan kode kegiatan pasca-revisi.
5. Terbatasnya SDM teknis dalam bidang perencanaan dan pengelolaan data kinerja.  
Perubahan sistem pelaporan terintegrasi (SRIKANDI, SIMKEU, dan e-Monev) memerlukan adaptasi cepat dari pegawai, sementara jumlah personel perencana dan operator sistem masih terbatas.
6. Kendala waktu pelaksanaan pasca-revisi.

Revisi DIPA baru disahkan pada pertengahan tahun, sehingga waktu efektif pelaksanaan kegiatan substantif menjadi lebih sempit. Kondisi ini menuntut percepatan kegiatan pada Triwulan IV yang berpotensi menimbulkan beban kerja tinggi dan risiko penumpukan realisasi di akhir tahun.

#### B. Tindak Lanjut dan Langkah Perbaikan

Sebagai respon atas berbagai hambatan tersebut, Balai Litbang Agama Makassar telah dan akan melaksanakan sejumlah langkah korektif dan tindak lanjut strategis, baik jangka pendek (Triwulan IV 2025) maupun jangka menengah (TA 2026), antara lain:

1. Memperkuat sinkronisasi lintas sistem dan koordinasi antar lembaga.  
Melalui koordinasi berkelanjutan dengan Bappenas, Kemenkeu, dan BMBPSDM untuk memastikan konsistensi data antara e-Monev dan SAKTI, serta penyelarasan kembali RO/KRO kelitbang agar tidak terjadi duplikasi atau kehilangan output di tahun mendatang.
2. Melakukan percepatan realisasi pada Triwulan IV 2025.  
Satuan kerja akan mengoptimalkan waktu pelaksanaan melalui penjadwalan ulang kegiatan, percepatan administrasi kontraktual, serta penguatan fungsi monitoring agar seluruh kegiatan strategis dapat terealisasi tepat waktu dan sesuai target output.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan kinerja dan sistem informasi.  
Melaksanakan pelatihan internal bagi operator perencanaan, keuangan, dan pelaporan agar lebih adaptif terhadap penggunaan sistem digital seperti SRIKANDI, SIMKEU, dan e-Monev.
4. Mengusulkan pembukaan blokir selektif pada kegiatan prioritas.  
Melalui mekanisme koordinasi dengan BMBPSDM dan Sekretariat Jenderal Kemenag, Balai akan mengajukan rekomendasi pembukaan blokir bagi kegiatan penelitian dan kajian strategis yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian output kelembagaan.
5. Menata ulang rencana kerja dan anggaran tahun 2026.  
Hasil pembelajaran dari revisi tahun ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan Renja dan DIPA tahun berikutnya, dengan menekankan pada pemisahan yang tegas antara program substantif dan operasional, serta perencanaan yang berbasis hasil (*result-based planning*).
6. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan pelaporan keuangan.
7. Memperkuat peran pejabat pengelola keuangan dan tim reviu internal agar proses penatausahaan, validasi bukti, dan pelaporan realisasi berjalan tepat waktu, akurat, dan sesuai prinsip akuntabilitas publik.

Dengan berbagai hambatan yang dihadapi, pelaksanaan revisi DIPA Tahun 2025 justru menjadi momentum penting bagi Balai Litbang Agama Makassar untuk memperkuat tata kelola perencanaan dan penganggaran. Penataan ulang program menjadi dua program kelitbang dan dua program kediklatan, diikuti peningkatan koordinasi antar lembaga, telah memperjelas fungsi substantif Balai sebagai **pusat riset dan pengkajian kebijakan strategis bidang agama dan pendidikan keagamaan**. Melalui langkah tindak lanjut yang telah disusun, diharapkan

efektivitas pelaksanaan anggaran pada Triwulan IV dan tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat capaian kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

## V. PENUTUP

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja dan realisasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan arah positif dalam tata kelola perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidaksinkronan sistem perencanaan dan penganggaran antar kementerian (Bappenas–Kemenkeu), tingginya pagu blokir, serta perubahan nomenklatur kelembagaan menuju BMBPSDM, satuan kerja mampu beradaptasi dengan cepat melalui langkah-langkah korektif yang terukur.

Revisi DIPA yang dilakukan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga momentum strategis untuk menata ulang struktur program dan kegiatan agar lebih mencerminkan mandat substantif lembaga sebagai pusat riset dan pengkajian kebijakan strategis bidang agama dan pendidikan keagamaan. Melalui penataan ini, Balai berhasil meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, memperkuat keterpaduan antar-sistem perencanaan dan pelaporan, serta mempertahankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan anggaran.

Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang meningkat setelah revisi menjadi indikator keberhasilan koordinasi lintas unit dan komitmen terhadap reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Dengan serapan 79,63% terhadap pagu aktif dan peningkatan capaian pada indikator utama seperti Nilai IKPA, Laporan Kinerja, dan Indeks Profesionalitas ASN, Balai Litbang Agama Makassar menunjukkan kinerja kelembagaan yang solid, adaptif, dan berorientasi hasil.

Ke depan, langkah-langkah tindak lanjut yang telah dirumuskan — termasuk sinkronisasi lintas sistem, peningkatan kapasitas SDM, percepatan kegiatan prioritas, dan penataan ulang perencanaan 2026 — diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi dalam mendukung misi BMBPSDM dan Kementerian Agama. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), Balai Litbang Agama Makassar berkomitmen untuk terus menjadi pusat riset dan inovasi kebijakan yang kredibel, inklusif, dan berdampak nyata bagi pembangunan kehidupan beragama di Indonesia.